

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT
BIRO UMUM
UNIT LAYANAN PENGADAAN

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat

PENGUMUMAN SELEKSI DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Nomor: PENG-02/SET.M.EKON.ULP.POKJA/TAKOM-KEK/02/2019

Kelompok Kerja Pemilihan II pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melaksanakan tender dengan Pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan jasa konsultansi perorangan sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan	:	Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Tenaga Ahli Koordinator Komunikasi Publik, Promosi dan Investasi pada Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Tahun Anggaran 2019
Lingkup pekerjaan	:	Jasa Konsultansi
Nilai total HPS	:	Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)
Sumber pendanaan	:	APBN Tahun Anggaran 2019
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	6 Maret 2019 s.d. 31 Oktober 2019 (6 Bulan Kalender)

2. Persyaratan Peserta

1. Berpendidikan Magister (S2) semua jurusan;
2. memiliki pengalaman kerja minimal 15 tahun di bidang komunikasi publik, promosi dan investasi;
3. memiliki pengalaman kerja terkait koordinasi pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus, serta mempunyai keahlian sektor khususnya infrastruktur wilayah, investasi dan geostrategis;
4. memiliki pengalaman dalam mengkoordinasikan proyek-proyek Kawasan Ekonomi Khusus/perkotaan yang dibiayai oleh APBN/APBD, serta pinjaman dalam dan luar negeri.
5. memiliki kemampuan bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan;
6. mampu bekerja *independent* dan efektif bekerja sebagai ketua tim;
7. Memiliki NPWP sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, serta memiliki bukti pembayaran pajak atas penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.;
8. Memiliki bukti pembayaran pajak penghasilan pada institusi pemberi kerja sebelumnya 1 tahun terakhir;
9. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan (melampirkan surat pernyataan bermaterai);

10. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau sebagai pegawai swasta (melampirkan surat pernyataan bermaterai)

3. Pendaftaran dan Pengambilan (*download*) Dokumen Pengadaan:

Calon Penyedia Barang/Jasa dapat mengambil Dokumen Pengadaan dengan mengunduh melalui aplikasi SPSE (www.lpse.lkpp.go.id).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 7 Februari 2019

Pokja Pemilihan II Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian